



Motif Ekonomi Picu Kekerasan di Daycare



Konferensi pers dugaan kekerasan daycare di Polresta Jogja, pada Senin (27/4).

JOGJA—Kasus dugaan kekerasan terhadap anak balita di sebuah daycare di Umbulharjo, Kota Jogja, diduga dipicu motif ekonomi serta lemahnya pengawasan layanan pengasuhan anak.

Ariq Fajar Hidayat, Lugas Subarkah, & Catur Dwi Janati redaksi@harianjogja.com

Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menilai kasus yang viral tersebut mengguncang kepercayaan publik terhadap layanan penitipan anak. Menurutnya, peristiwa ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga

- ▶ Kementerian PPPA mendorong penelusuran menyeluruh guna memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan.
- ▶ Pemerintah daerah diminta mendata dan mengevaluasi seluruh daycare.

membuka celah serius dalam sistem perlindungan anak.

"Dari analisis sementara, motifnya mengarah pada ekonomi. Targetnya pemasukan besar, sehingga pelaku menghalalkan berbagai cara," ujar Arifah saat konferensi pers di Polresta Jogja, Senin (27/4).

▶ Halaman 11

Motif Ekonomi...

Ia menegaskan, segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Pemerintah, kata dia, memprioritaskan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis dan bantuan hukum secara komprehensif.

Selain itu, Kementerian PPPA mendorong penelusuran menyeluruh guna memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan. Arifah juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap daycare, terutama terkait aspek perizinan dan standar layanan.

"Ditemukannya lembaga yang belum memenuhi aspek perizinan dan standar menunjukkan adanya celah yang harus segera dibenahi," katanya.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mendorong penguatan standar melalui kebijakan taman asuh ramah anak (TARA) yang mencakup legalitas, kualitas pengasuhan, kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengawasan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diminta mendata dan mengevaluasi

seluruh daycare.

Sementara itu, Polresta Jogja telah menetapkan 13 tersangka, terdiri atas pengelola hingga pengasuh. Kapolresta Jogja, Eva Guna Pandia, merinci satu tersangka merupakan ketua yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 lainnya pengasuh. "Sejauh ini ada 13 tersangka. Inisial DK sebagai ketua yayasan, AP sebagai kepala sekolah, dan 11 lainnya pengasuh," ujarnya.

Ia menyebut foto-foto kekerasan yang beredar di media sosial merupakan fakta. Polisi juga menemukan adanya perlakuan tidak manusiawi, termasuk penempatan anak di ruangan yang melebihi kapasitas dengan sirkulasi udara minim, serta praktik pengikatan tangan dan kaki.

Penyidik masih mendalami kemungkinan praktik tersebut dilakukan secara sistematis, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain seperti pembina yayasan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman pidana penjara dan denda.

Respons Pemda DIY

Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono

X menyelaskan terjadinya kasus tersebut dan menegaskan tidak ada ruang bagi kekerasan di DIY. "Harapan saya, itu yang pertama dan terakhir. Karena di Jogja kita tidak menoleransi kekerasan," tegas Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin.

Ia mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan serta meminta semua pihak menghormati penyidikan. Pemda DIY, kata Sultan, telah mengambil langkah awal perlindungan bagi korban, termasuk pengamanan serta pendampingan medis dan psikologis.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan operasional daycare tidak boleh semata berorientasi bisnis, melainkan harus mengedepankan tanggung jawab moral dan kepercayaan. "Ini bukan sekadar komersialisasi. Yang kita bicarakan adalah anak-anak, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan harus dijaga."

Koordinasi Lintas Kementerian

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan

pemerintah telah berkoordinasi dengan Polda DIY untuk menangani kasus tersebut. "Itu kejadian yang memprihatinkan. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, termasuk Kapolda DIY," ujarnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin.

Ia menegaskan perlindungan anak menjadi prioritas pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini, menurutnya, menjadi momentum memperkuat pengawasan lembaga pendidikan nonformal dan jasa penitipan anak secara nasional.

Adapun Juru Bicara Universitas Gadjah Mada, I Made Andi Arsana, mengonfirmasi salah satu penasihat Yayasan Daycare Little Aresha merupakan dosen aktif di kampus tersebut. Namun, keterlibatan itu bersifat pribadi. "Yang bersangkutan terlibat dalam kapasitas pribadi, bukan mewakili institusi," ujarnya.

UGM menegaskan tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan yayasan tersebut dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus menegaskan komitmen pada perlindungan anak.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005